

## ***Utilizing Social Media to Increase Postpartum Family Planning Participation in Indonesia***

### **Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Kesertaan KB Pascapersalinan di Indonesia**

**Zaitun Faridah**

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan  
zaitunfaridah@gmail.com

#### **Abstract**

*This Policy Paper presents a comprehensive analysis of the strategic issues facing the Family Development, Population and Family Planning Program in Indonesia and proposes the use of social media as a transformative solution in efforts to increase participation in Postpartum Family Planning (KBPP) in Indonesia. This Policy Paper identifies the lack of utilization of information technology, especially social media, as a top priority issue. The target performance indicator for the percentage of Postpartum Family Planning services in 2025 is 57 percent with a realization of 44.8%. This realization is obtained based on KBPP service coverage data from SIGA 2025 and estimated birth data for 2025 based on the results of the 2025 Family Data Update calculation. The main obstacles include negative perceptions of KBPP influenced by cultural norms, religious values, and social stigma, as well as myths that develop in society. Social media has great potential as a means of Communication, Information, and Education (KIE) to reach fertile couples, pregnant women, and postpartum mothers massively and directly.*

**Keywords:** Postpartum Family Planning, Utilization of Social Media.

#### **Abstrak**

Policy Paper ini menyajikan analisis komprehensif mengenai isu strategis yang dihadapi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia dan mengusulkan pemanfaatan media sosial sebagai solusi transformatif dalam upaya peningkatan kesertaan KB Pascapersalinan (KBPP) di Indonesia. Policy Paper ini mengidentifikasi kurangnya pemanfaatan teknologi informasi terutama media sosial sebagai masalah prioritas utama, Target indikator kinerja persentase pelayanan KB Pascapersalinan pada tahun 2025 adalah sebesar 57 persen dengan realisasi sebesar 44,8% persen. Realisasi ini diperoleh berdasarkan data cakupan pelayanan KBPP dari SIGA 2025 dan data perkiraan melahirkan tahun 2025 berdasarkan hasil perhitungan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2025. Kendala utama meliputi persepsi negatif terhadap KBPP yang dipengaruhi norma budaya, nilai agama, dan stigma sosial, serta mitos yang berkembang di masyarakat. Media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk menjangkau pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu Pascapersalinan secara masif dan langsung.

**Kata Kunci:** Keluarga Berencana Pascapersalinan, Pemanfaatan Media Sosial.

### **1. Pendahuluan**

Salah satu upaya dalam percepatan penurunan angka *stunting* di Indonesia antara lain melalui peningkatan kesertaan KB untuk menunda atau menjarangkan kelahiran melalui pelayanan KB Pascapersalinan (KBPP). Metode KBPP langsung digunakan sesaat setelah ibu bersalin sehingga menjadi salah satu upaya untuk menyikapi missed opportunity dalam pelayanan KB. Akan tetapi perkembangan hasil pelayanan KBPP menggambarkan cakupan pelayanan KBPP yang masih rendah dari target 57 persen dengan realisasi sebesar 44,8% persen. Realisasi ini diperoleh berdasarkan data cakupan pelayanan KBPP dari SIGA 2025 dan data perkiraan melahirkan tahun 2025 berdasarkan hasil perhitungan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2025. Dalam upaya untuk meningkatkan capaian pelayanan KBPP

tidak lepas dari peran Bidan sebagai tenaga Kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi meliputi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), konseling dan memberikan pelayanan kontrasepsi.

Kesertaan KB Pascapersalinan (KBPP) di Indonesia masih belum optimal meskipun akses terhadap layanan kesehatan terus meningkat. Salah satu faktor utama adalah kurangnya edukasi yang tepat waktu, keterbatasan konseling, serta rendahnya kesadaran ibu dan keluarga. Sementara itu Lebih dari 70% penduduk Indonesia adalah pengguna aktif media sosial dan Platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp menjadi sumber utama informasi kesehatan informal. Hal ini membuka peluang untuk menjadikan media sosial sebagai kanal intervensi kesehatan masyarakat.

Meskipun potensi edukasi melalui media sosial sangat besar dalam meningkatkan angka KB Pascapersalinan (KBPP), pemanfaatannya hingga saat ini belum terintegrasi secara strategis dalam kebijakan nasional. Pendekatan komunikasi program KB masih didominasi oleh metode konvensional seperti penyuluhan tatap muka, distribusi media cetak, serta iklan layanan masyarakat melalui televisi dan radio. Model komunikasi ini cenderung bersifat satu arah, kurang adaptif terhadap perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat, serta memiliki keterbatasan dalam menjangkau kelompok usia reproduktif yang semakin bergantung pada platform digital.

Disisi lain, kebijakan yang ada belum secara eksplisit mendorong integrasi lintas sektor antara kesehatan dan ekosistem digital. Keterlibatan aktor non-tradisional seperti content creator, influencer, maupun komunitas digital masih bersifat sporadis dan belum dilembagakan dalam kerangka program nasional. Padahal, aktor-aktor ini memiliki peran strategis sebagai opinion leader yang mampu membentuk persepsi, norma sosial, dan perilaku kesehatan secara lebih efektif dan persuasif dibandingkan pendekatan konvensional.

Ketiadaan kerangka kebijakan yang mengatur kolaborasi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara potensi dan implementasi. Program komunikasi KB belum mampu memanfaatkan kekuatan algoritma media sosial, segmentasi audiens, serta pendekatan berbasis data untuk menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat. Akibatnya, pesan-pesan terkait KB Pascapersalinan kalah bersaing dengan arus informasi lain yang lebih menarik namun belum tentu akurat, sehingga berkontribusi pada rendahnya literasi dan tingginya misinformasi di masyarakat.

Didukung situasi perkembangan zaman kini, kehadiran media sosial dapat menjadi alternatif sarana yang edukatif, informatif, serta inspiratif, untuk Bidan dalam melakukan KIE KBPP salah satunya adalah melalui platform media sosial Tiktok. Sebuah jurnal. Ada sekitar 106,51 juta pengguna Tiktok di Indonesia pada oktober 2023 (laporan We are social). Contoh keberhasilan pemanfaatan media sosial terlihat dari akun Tiktok salah satu bidan dengan 1,6 juta pengikut yang berhasil memberikan edukasi kesehatan ibu dan anak serta menjawab mitos-mitos terkait kontrasepsi melalui konten edukatif yang dikemas dengan unsur humor, dengan memanfaatkan jangkauan dan popularitas Tiktok ini di Indonesia, bidan dapat memainkan peran penting dalam memberikan KIE KBPP yang berkualitas dan mudah diakses serta dapat melakukan interaksi 2 arah sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta mengubah persepsi PUS, Ibu Hamil dan Ibu Pascasalin.

Berdasarkan kondisi tersebut Policy Paper ini merekomendasikan pemanfaatan media sosial sebagai strategi komunikasi kesehatan yang efektif, terukur, dan berbasis perilaku untuk meningkatkan capaian KB Pascapersalinan Indonesia.

Analisis mendalam terhadap kondisi program Keluarga Berencana di lapangan mengidentifikasi lima masalah utama yang saling terkait dan menghambat pencapaian target KB Pascapersalinan (KBPP) di Indonesia. Dengan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), masalah yang memperoleh skor tertinggi adalah lemahnya sistem komunikasi dan edukasi terkait KB Pascapersalinan, khususnya belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai kanal strategis. Dari aspek urgency, masalah ini bersifat mendesak karena rendahnya literasi dan tingginya paparan misinformasi secara langsung memengaruhi keputusan ibu dalam periode kritis Pascapersalinan, yang merupakan waktu paling efektif untuk intervensi KB. Dengan demikian, penguatan strategi komunikasi berbasis media sosial menjadi prioritas kebijakan yang tidak hanya relevan, tetapi juga memiliki potensi dampak luas terhadap peningkatan capaian KB Pascapersalinan di Indonesia.

**Tabel 1.** Gambaran Statistik dan Tantangan Kunci Program KB Indonesia

Aspek Masalah	Data Kunci & Indikasi	Implikasi
Pencapaian KBPP	KBPP Indonesia 2025 : 44,8 % (BKKBN)	Mendekati dari target 57%, namun masih rawan stagnansi dan disparitas regional.
Keterbatasan SDM	Rasio penyuluh: keluarga rendah. Tenaga medis dan bidan kurang terlatih untuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).	Menurunkan jangkauan program dan membatasi pilihan kontrasepsi yang tersedia bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil.
Tantangan Lapangan	Kurangnya sosialisasi, KBPP, hambatan geografis dan cuaca, serta pencatatan manual yang tidak akurat.	Menghambat pelaksanaan program, menciptakan <i>unmet need</i> atau kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan menyebabkan data pelaporan menjadi tidak akurat.
Literasi Masyarakat	Minat baca rendah (0,001%). <sup>8</sup> Masyarakat masih menghadapi disinformasi dan pandangan yang keliru tentang KB.	Menghambat pemahaman masyarakat tentang pentingnya program KB dan menyulitkan edukasi.

Akar masalah yang teridentifikasi dari analisis multi-level ini adalah bahwa layanan Keluarga Berencana (KB) belum mampu menyediakan informasi yang personal, akurat, dan berkelanjutan kepada sasaran, khususnya ibu Pascapersalinan. Layanan yang ada masih cenderung bersifat umum, tidak tersegmentasi, dan bergantung pada interaksi tatap muka yang terbatas.

Kondisi ini terutama disebabkan oleh keterbatasan tenaga penyuluh dan tenaga kesehatan, yang berdampak pada tidak optimalnya frekuensi dan kualitas konseling. Akibatnya, banyak ibu tidak mendapatkan pendampingan yang cukup dalam memahami pilihan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi mereka.

## Isu

Pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan kesertaan KB Pascapersalinan merupakan prioritas nasional untuk mempercepat penurunan angka kelahiran yang tidak direncanakan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mendukung pengendalian penduduk yang berkualitas. Namun, implementasinya di daerah masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas program.

## Masalah

1. Rendahnya literasi dan pengetahuan masyarakat, khususnya ibu Pascapersalinan, mengenai manfaat dan pilihan metode kontrasepsi. Penelitian menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan sikap memiliki hubungan signifikan dengan keputusan penggunaan KBPP. Kurangnya pemahaman ini sering kali diperparah oleh misinformasi serta persepsi negatif terhadap efek samping kontrasepsi.
2. Keterbatasan dan kualitas layanan kesehatan yang belum optimal, termasuk kurangnya konseling yang efektif, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta ketersediaan alat kontrasepsi. Faktor layanan seperti akses, kompetensi tenaga kesehatan, dan kualitas konseling terbukti menjadi determinan penting dalam rendahnya penggunaan KBPP.
3. Lemahnya dukungan sosial, terutama dari suami dan keluarga, yang masih menjadi determinan utama dalam pengambilan keputusan reproduksi. Studi menunjukkan bahwa dukungan suami berpengaruh signifikan terhadap penggunaan KB Pascapersalinan. Dalam banyak kasus, keputusan KB tidak sepenuhnya berada di tangan perempuan, melainkan dipengaruhi oleh norma keluarga dan budaya.

**Tabel 2.** Analisis USG (Urgency–Seriousness–Growth).

Daftar Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total
Masalah 1	4	4	4	12
Masalah 2	5	5	5	15
<b>Masalah 3</b>	5	4	4	13

Berdasarkan hasil analisis USG, masalah nomor 2 memperoleh skor tertinggi, sehingga ditetapkan sebagai masalah utama kebijakan, yaitu: Keterbatasan dan kualitas layanan kesehatan yang belum optimal, termasuk kurangnya konseling yang efektif, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta ketersediaan alat kontrasepsi. Faktor layanan seperti akses, kompetensi tenaga kesehatan, dan kualitas konseling terbukti menjadi determinan penting dalam rendahnya penggunaan KBPP

## Penyebab Masalah Level 1

Mengapa menjadi masalah nomor 2?

- a. Sistem layanan kemudahan akses yang sangat penting
- b. Kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan informasi dan konseling, serta kualitas interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien terbukti menjadi determinan penting dalam memengaruhi keputusan penggunaan KB Pascapersalinan
- c. Konseling yang kurang komprehensif dan tidak berkelanjutan seringkali menyebabkan rendahnya pemahaman dan kepercayaan ibu terhadap metode kontrasepsi, sehingga berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan KB Pascapersalinan.

## **Penyebab Masalah Level 2**

Penyebab dari masalah 2a

(Mengapa Sistem layanan seperti kemudahan akses?)

- 2a1. Keterbatasan jangkauan fasilitas pelayanan kesehatan
- 2a2. Waktu dan mekanisme layanan yang kurang fleksibel
- 2a3. Belum terintegrasinya layanan KB

## **Penyebab dari masalah 2b**

(Mengapa Kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan informasi dan konseling?)

- 2.a1. Keterbatasan pelatihan dan peningkatan kapasitas
- 2.a2. Beban kerja yang tinggi
- 2.a3. Keterbatasan keterampilan komunikasi interpersonal

## **Penyebab dari masalah 2c**

(Mengapa Konseling yang kurang komprehensif dan tidak berkelanjutan?)

- 2.c1. Belum adanya standar dan alur konseling yang terintegrasi
- 2.c2 Keterbatasan waktu dan beban kerja tenaga Kesehatan tidak memiliki cukup waktu untuk konseling mendalam
- 2.c3 Konseling yang tidak dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga Pascapersalinan mengakibatkan tidak terbentuknya proses penguatan informasi dan keyakinan ibu terhadap penggunaan kontrasepsi. Akibatnya, ibu lebih mudah terpengaruh oleh mitos atau informasi yang tidak akurat dari lingkungan sekitar

## **Akar Masalah**

Berdasarkan analisis penyebab masalah level 2, dapat diidentifikasi akar masalah sebagai berikut:

1. Sistem layanan dengan kemudahan akses yang belum optimal  
Kemudahan akses terhadap layanan KB Pascapersalinan masih terbatas, baik dari aspek jangkauan fasilitas, ketersediaan layanan di titik persalinan, maupun fleksibilitas waktu pelayanan. Kondisi ini menyebabkan ibu kesulitan memperoleh layanan secara tepat waktu, sehingga meningkatkan risiko tidak menggunakan KB setelah melahirkan.
2. Kompetensi tenaga kesehatan dan kualitas interaksi yang belum memadai  
Kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan informasi dan konseling, serta kualitas interaksi dengan pasien, belum optimal. Keterbatasan dalam komunikasi efektif, penyampaian informasi yang tidak lengkap, serta kurangnya pendekatan yang empatik memengaruhi tingkat pemahaman dan kepercayaan ibu, sehingga berdampak pada rendahnya pengambilan keputusan untuk menggunakan KB Pascapersalinan.
3. Konseling yang belum komprehensif dan berkelanjutan  
Pelaksanaan konseling belum mencakup seluruh tahapan pelayanan (kehamilan, persalinan, dan Pascapersalinan) serta belum dilakukan secara berkesinambungan. Akibatnya, informasi yang diterima ibu tidak utuh dan tidak diperkuat secara berkala, sehingga pemahaman dan keyakinan terhadap penggunaan kontrasepsi menjadi rendah dan berujung pada rendahnya pemanfaatan layanan KB

### Problem Statement

Berdasarkan identifikasi akar masalah tersebut, pernyataan masalah dalam policy paper ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rendahnya kesertaan KB Pascapersalinan masih menjadi tantangan yang signifikan, yang dipengaruhi oleh belum optimalnya sistem layanan kesehatan dalam kemudahan akses, terbatasnya kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan informasi dan konseling yang efektif, serta belum terlaksananya konseling yang komprehensif dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pemahaman dan kepercayaan ibu terhadap metode kontrasepsi, sehingga berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan KB Pascapersalinan.

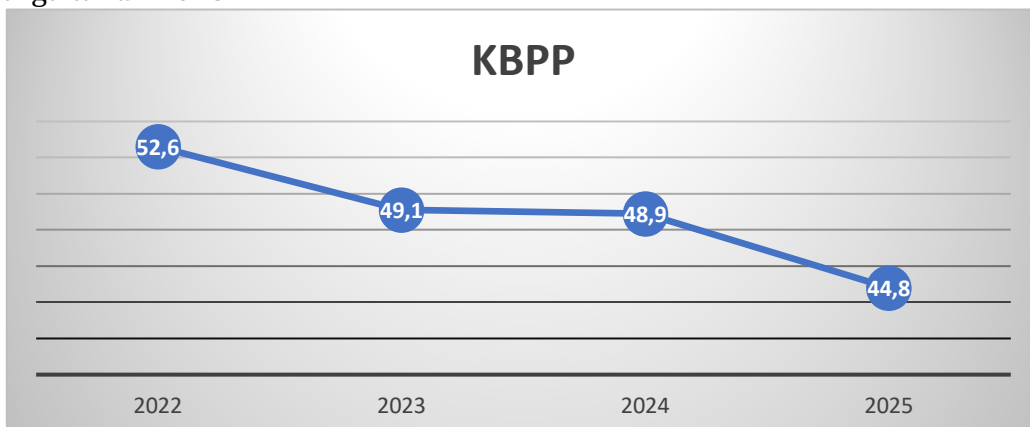
Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan promosi kesehatan belum dioptimalkan untuk mendukung proses konseling dan pengambilan keputusan, sehingga peluang untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat belum dimanfaatkan secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang terintegrasi untuk memperkuat sistem layanan, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, serta mengoptimalkan pemanfaatan media sosial guna mendorong peningkatan kesertaan KB Pascapersalinan secara efektif dan berkelanjutan.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### Tantangan Meningkatkan Kesertaan KBPP di Indonesia

Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan hingga 42 hari, dengan tujuan untuk mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan, dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga keluarga dapat merencanakan kehamilan berikutnya secara aman dan sehat. Target indikator kinerja persentase pelayanan KB Pascapersalinan pada tahun 2025 adalah sebesar 57 persen dengan realisasi sebesar 44,8% persen. Realisasi ini diperoleh berdasarkan data cakupan pelayanan KBPP dari SIGA 2025 dan data perkiraan melahirkan tahun 2025 berdasarkan hasil perhitungan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2025.



Gambar 1. Grafik Perkembangan KBPP di Indonesia

Adapun metode perhitungan realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:  
=  $\frac{\text{Jumlah Capaian KBPP Tahun 2025}}{\text{Jumlah persalinan tahun 2025}} \times 100\%$   
=  $\frac{2.083.194}{4.652.204} \times 100\%$

= 44,8%

Sehingga capaian kinerja indikator persentase pelayanan KB Pascapersalinan tahun 2025 sebesar 78,6 capaian kinerja indikator persentase pelayanan KB Pascapersalinan tahun 2025 sebesar 78,6%, yang diperoleh melalui metode perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (44,8\%)}}{\text{Target (57\%)}} \times 100\% = 78,6$$

Permasalahan atas capaian kinerja indikator persentase pelayanan KB Pascapersalinan (KBPP) tahun 2025 sebesar 78,9 persen (realisasi kinerja sebesar 44,8 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 57 persen) berada pada predikat baik, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor penyebab yang menjadi hambatan keberhasilan yang dihadapi antara lain:

1. Belum tersedianya data persalinan *real time* atau bulanan (sasaran utama KBPP)
2. Masih kurangnya pemahaman keluarga tentang pentingnya mengikuti KB Pascapersalinan, mitos dan stigma terkait penggunaan kontrasepsi Pascapersalinan, serta keberagaman budaya dan adat tradisional yang mempengaruhi keputusan PUS ber-KB Pascapersalinan.
3. Pengetahuan dan pemahaman ibu Pascapersalinan mengenai program KBPP masih kurang, terutama mengenai pentingnya KB segera setelah melahirkan dan paling lambat 42 hari. Sebagian besar ibu menerima layanan KB setelah >42 hari Pascapersalinan
4. Pelayanan KBPP di Rumah sakit dan Klinik masih belum optimal, dimana ibu bersalin tinggi namun pelayanan KBPP rendah
5. Pembiayaan jasa medis pelayanan KB Pascapersalinan di rumah sakit masih satu paket dengan biaya persalinan sehingga *provider* kurang mendukung pelayanan KB Pascapersalinan;
6. Kurangnya pemahaman dan prioritas pemerintah daerah terhadap urgensi serta manfaat program KBPP dalam perencanaan dan penganggaran daerah
7. Cakupan pelaporan KBPP pada sistem SIGA masih kurang optimal, terutama pada Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) dan Klinik masih ada sekitar 25% yang belum melapor pada SIGA
8. Adanya perubahan sistem dalam proses pencatatan dan pelaporan SIGA dimana ada proses penginputan verval yang membutuhkan banyak tahapan dan kurangnya sosialisasi dari Pusdatin terkait sistem pencatatan baru tersebut kepada operator SIGA di provinsi dan kabupaten/kota
9. Belum optimalnya upaya penggerakan tenaga kesehatan, tenaga lini lapangan dan TPK dalam melakukan Pendampingan dan Promosi dan KIE KB Pascapersalinan
10. Dukungan anggaran yang belum maksimal dalam penggerakan dan peningkatan promosi, KIE, dan konseling KB Pascapersalinan;

Persentase masyarakat terjangkau Program Bangga Kencana tahun 2025 adalah sebesar 108,0 persen. Angka 108,0% menunjukkan bahwa cakupan program ditargetkan tidak hanya menjangkau seluruh sasaran utama, tetapi juga melampaui target populasi tertentu (*over-achievement*), Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana program mampu menjangkau masyarakat melalui edukasi, pelayanan KB, dan pembangunan keluarga.

BKKBN dalam Peraturan Kepala BKKBN No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis BKKBN 2020–2024 menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan KB, termasuk penguatan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan KB. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas intervensi dan memperluas jangkauan layanan KB secara inklusif yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesertaan KBPP di Indonesia.

Promosi dan konseling kesehatan reproduksi merupakan bagian dari Program dan kegiatan proyek prioritas nasional (Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan). Bentuk kegiatan tersebut adalah peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi menetapkan 2 (dua) indikator yang digunakan dalam mengukur tercapainya sasaran kinerja “Meningkatnya kualitas Kesehatan Reproduksi yaitu salah satunya Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan. Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi menetapkan target pelayanan KBPP pada tahun 2025 sebesar 57% dengan realisasi sebesar 44,8%. Target tersebut belum tercapai sehingga diperlukan upaya yang komprehensif dalam mencapai target tahun 2026 sebesar 60%. Harapannya jika cakupan pelayanan KB Pascapersalinan tinggi maka akan dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan dengan aman dan sehat, menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta mencegah stunting pada anak, yang merupakan program prioritas nasional. Diperlukan upaya yang lebih masif dan merata, koordinasi dan integrasi dengan lintas sektor terkait serta advokasi kepada pengelola program KB dan *stakeholder* untuk mendukung peningkatan pelayanan KB Pascapersalinan.

### **Potensi Media Sosial untuk meningkatkan Kesertaan KBPP**

Media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang efektif dalam menyebarkan informasi kesehatan, termasuk mengenai KBPP. Tingginya penggunaan platform digital di Indonesia membuka peluang besar untuk menjangkau ibu usia reproduksi secara lebih luas, cepat, dan interaktif.

Salah satu potensi utama media sosial adalah kemampuannya dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran. Informasi mengenai manfaat KBPP, jenis-jenis kontrasepsi, serta waktu penggunaan yang tepat dapat disampaikan melalui konten yang menarik seperti video pendek, infografis, dan testimoni. Hal ini membantu mengatasi keterbatasan informasi yang sering menjadi hambatan.

Selain itu, media sosial juga berperan dalam meluruskan mitos dan persepsi negatif terkait KB. Banyak masyarakat yang masih percaya pada informasi yang tidak akurat, sehingga kehadiran konten edukatif dari tenaga kesehatan atau institusi resmi dapat meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat.

Potensi lain adalah dalam membangun dukungan sosial. Melalui komunitas online, ibu dapat berbagi pengalaman, bertanya, dan mendapatkan dukungan dari sesama pengguna maupun tenaga kesehatan. Dukungan ini penting dalam mendorong pengambilan keputusan untuk menggunakan KBPP.

Media sosial juga memungkinkan komunikasi dua arah antara masyarakat dan tenaga kesehatan. Fitur seperti komentar, pesan langsung, atau live session dapat dimanfaatkan untuk konsultasi ringan dan menjawab pertanyaan secara real-time.

Di sisi lain, media sosial dapat digunakan sebagai alat kampanye dan promosi program pemerintah. Informasi mengenai layanan KB, lokasi fasilitas kesehatan, hingga program gratis dapat disebarluaskan secara masif dan terarah.

### **Studi Kasus dan Praktik Baik**

Upaya meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) dapat dilakukan melalui berbagai praktik baik yang telah terbukti efektif di lapangan. Salah satu praktik utama adalah integrasi layanan KB dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama saat antenatal care (ANC), persalinan, dan masa nifas. Dengan integrasi ini, ibu dapat langsung memperoleh informasi dan layanan KB tanpa harus datang kembali ke fasilitas kesehatan.

Praktik baik lainnya adalah pemberian konseling yang komprehensif dan berkelanjutan oleh tenaga kesehatan. Konseling tidak hanya diberikan kepada ibu, tetapi juga melibatkan suami atau keluarga agar tercipta dukungan dalam pengambilan keputusan penggunaan KB. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan juga menjadi kunci. Tenaga kesehatan perlu dibekali keterampilan dalam memberikan edukasi, melakukan pemasangan alat kontrasepsi, serta menangani efek samping secara tepat.

Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital juga termasuk praktik baik yang semakin relevan. Edukasi melalui platform digital dapat menjangkau lebih banyak sasaran dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KBPP.

Tidak kalah penting, penyediaan alat dan metode kontrasepsi yang lengkap dan mudah diakses harus dipastikan di setiap fasilitas kesehatan. Ketersediaan pilihan metode memungkinkan ibu memilih kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

### **Risiko dan Tantangan pemanfaatan media sosial**

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan promosi memiliki potensi besar, namun juga dihadapkan pada berbagai risiko dan tantangan yang perlu diantisipasi.

#### **1. Penyebaran Informasi yang Tidak Akurat (Hoaks)**

Media sosial memungkinkan siapa saja menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Akibatnya:

- Muncul mitos atau informasi keliru
- Masyarakat sulit membedakan sumber terpercaya

Hal ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap program kesehatan seperti KBPP.

#### **2. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat**

Tidak semua pengguna memiliki kemampuan untuk:

- Memahami informasi kesehatan dengan benar
- Menilai kredibilitas sumber

Akibatnya, masyarakat mudah terpengaruh oleh konten yang menyesatkan.

#### **3. Overload Informasi (Information Overload)**

Banyaknya konten yang beredar dapat menyebabkan:

- Kebingungan dalam memilih informasi yang tepat

- Penurunan perhatian terhadap pesan edukatif  
Pesan penting sering kalah dengan konten hiburan.

#### **4. Tantangan Kredibilitas Sumber**

Informasi dari tenaga kesehatan atau institusi resmi sering kalah populer dibanding:

- Influencer tanpa latar belakang medis
- Konten viral yang belum tentu benar

Ini menjadi tantangan dalam membangun kepercayaan publik.

#### **5. Risiko Privasi dan Keamanan Data**

Interaksi di media sosial berpotensi menimbulkan:

- Kebocoran data pribadi
- Penyalahgunaan informasi pengguna

Terutama jika digunakan untuk konsultasi kesehatan.

#### **6. Kesenjangan Akses Digital**

Tidak semua masyarakat memiliki:

- Akses internet yang memadai
- Perangkat digital yang mendukung

Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penerimaan informasi.

#### **7. Kurangnya Pengelolaan Konten yang Konsisten**

Program kesehatan sering menghadapi kendala:

- Konten yang tidak rutin diperbarui
- Kurangnya strategi komunikasi digital

Sehingga pesan yang disampaikan tidak berkelanjutan.

#### **8. Risiko Interpretasi yang Salah**

Informasi kesehatan yang disampaikan secara singkat (misalnya video pendek) berisiko:

- Disalahartikan
- Tidak dipahami secara utuh

Hal ini dapat memengaruhi keputusan masyarakat.

Dengan kesimpulan bahwa media sosial memiliki potensi besar dalam mendukung program kesehatan, terdapat berbagai risiko dan tantangan yang harus dikelola dengan baik. Diperlukan strategi komunikasi yang tepat, peningkatan literasi digital, serta pengawasan konten untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan bermanfaat.

### **Alternatif Pilihan Kebijakan**

Untuk meningkatkan kesertaan KBPP di Indonesia terdapat beberapa alternatif kebijakan baik yang bersifat konvensional maupun yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan intervensi langsung terhadap penyebab utama rendahnya kesertaan KBPP di Indonesia. Berikut beberapa alternatif kebijakan yang dapat dijadikan pilihan:

#### **1. Alternatif Pertama : Status Quo**

Alternatif pertama mempertahankan sistem penyuluhan Program Bangga Kencana yang bersifat konvensional, dengan mengandalkan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai ujung tombak edukasi. Pendekatan ini berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada melalui pelatihan konvensional serta peningkatan

sarana dan prasarana, seperti Posyandu, tanpa melibatkan pemanfaatan media sosial.

Kelebihan dari alternatif ini terletak pada stabilitas sistem, karena tidak memerlukan perubahan struktural yang signifikan dalam mekanisme penyuluhan KB. Selain itu, pendekatan ini dapat meminimalkan resistensi terhadap perubahan dari tenaga lapangan yang telah terbiasa dengan metode konvensional. Dari sisi pembiayaan, alternatif ini juga relatif lebih efisien karena tidak membutuhkan investasi tambahan yang besar untuk pengembangan dan pengelolaan media sosial. Di samping itu, fokus kebijakan dapat diarahkan sepenuhnya pada peningkatan kualitas SDM yang ada tanpa terdistraksi oleh kebutuhan adaptasi terhadap teknologi baru yang mungkin memerlukan waktu, pelatihan tambahan, dan penyesuaian sistem kerja.

Namun, alternatif ini memiliki kelemahan dalam mengatasi akar permasalahan, yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, terutama media sosial, yang saat ini menjadi salah satu saluran komunikasi utama masyarakat. Pendekatan konvensional cenderung memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan kecepatan penyebaran informasi, sehingga kurang efektif dalam menjangkau kelompok usia produktif yang lebih aktif di platform digital.

Selain itu, metode penyuluhan tatap muka sangat bergantung pada ketersediaan tenaga lapangan serta waktu dan lokasi, sehingga tidak selalu mampu menjangkau seluruh sasaran secara merata, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Kurangnya inovasi dalam metode komunikasi juga berpotensi menyebabkan pesan yang disampaikan kurang menarik dan kurang relevan bagi generasi muda. Dengan tidak memanfaatkan media sosial, alternatif ini juga berisiko kehilangan peluang untuk meningkatkan interaksi dua arah, memperluas jangkauan edukasi, serta membangun kesadaran masyarakat secara lebih masif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun stabil dan minim risiko perubahan, pendekatan status quo dinilai kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan komunikasi masyarakat saat ini.

## 2. Alternatif kedua : Pemanfaatan Media Sosial Facebook

Pemanfaatan media sosial, khususnya Facebook, merupakan salah satu alternatif kebijakan yang potensial dalam meningkatkan kesertaan KBPP di Indonesia. Facebook sebagai salah satu platform dengan jumlah pengguna terbesar memiliki jangkauan yang luas dan mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pasangan usia subur.

Melalui platform ini, informasi dapat disebarkan secara cepat, luas, dan interaktif. Facebook memungkinkan penyampaian pesan edukasi dalam berbagai format, seperti teks, gambar, infografis, dan video edukatif. Konten-konten tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan jenis-jenis kontrasepsi, manfaat penggunaan KBPP, serta meluruskan mitos atau kesalahpahaman yang masih berkembang di masyarakat.

Penyajian informasi yang menarik, sederhana, dan mudah dipahami berpotensi meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga. Selain itu, fitur berbagi (*share*) yang dimiliki Facebook memungkinkan penyebaran informasi secara organik, sehingga pesan edukasi dapat menjangkau audiens yang lebih luas tanpa terbatas oleh wilayah geografis.

Di samping itu, Facebook juga mendukung interaksi dua arah antara penyedia informasi dan masyarakat melalui fitur komentar, pesan, dan siaran langsung (*live*).

Hal ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih responsif, termasuk dalam menjawab pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan KBPP.

### 3. Alternatif ketiga: Pemanfaatan Media Sosial Tiktok

TikTok memiliki keunggulan dalam hal jangkauan, kreativitas, dan interaktivitas, sehingga sangat potensial digunakan sebagai media edukasi kesertaan KBPP untuk meningkatkan kesadaran dan kesertaan masyarakat.

TikTok menawarkan format konten video pendek yang menarik, kreatif, dan mudah dipahami, sehingga efektif dalam menyampaikan pesan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda dan pasangan usia subur. Melalui konten yang dikemas secara informatif dan komunikatif, berbagai informasi terkait jenis kontrasepsi, manfaat KBPP, serta klarifikasi terhadap mitos yang beredar dapat disampaikan secara lebih sederhana dan mudah diterima.

Selain itu, algoritma TikTok memungkinkan penyebaran konten secara luas dan cepat, bahkan kepada pengguna yang tidak secara langsung mengikuti akun penyedia informasi. Hal ini memberikan peluang besar bagi pesan-pesan edukasi KB untuk menjadi viral dan menjangkau audiens yang lebih luas.

Interaksi pengguna melalui fitur komentar, *likes*, dan *share* juga mendukung terbentuknya komunikasi dua arah serta meningkatkan keterlibatan (*engagement*) masyarakat terhadap konten yang disampaikan. Dengan strategi konten yang tepat, TikTok dapat menjadi media yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya KBPP.

### Evaluasi Alternatif Komparatif

Setelah dilakukan evaluasi komparatif antar alternatif kebijakan, pemanfaatan media sosial TikTok direkomendasikan sebagai alternatif kebijakan yang paling optimal. Hal ini dikarenakan TikTok memiliki kemampuan yang sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan, penyebaran informasi, serta edukasi dan komunikasi terkait pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan penggunaan kontrasepsi.

Melalui format video pendek yang menarik, kreatif, dan mudah dipahami, TikTok mampu menyampaikan pesan edukatif secara lebih sederhana dan cepat diterima oleh masyarakat, khususnya pasangan usia subur. Selain itu, algoritma TikTok memungkinkan konten menjangkau audiens yang luas secara organik, bahkan di luar pengikut akun, sehingga potensi penyebaran informasi menjadi lebih masif.

Tingkat interaksi (*engagement*) yang tinggi melalui fitur komentar, *like*, dan *share* juga mendukung terjadinya komunikasi dua arah antara penyedia informasi dan masyarakat. Hal ini memungkinkan klarifikasi langsung terhadap pertanyaan, mitos, maupun kekhawatiran terkait penggunaan KBPP.

Dengan demikian, pemanfaatan TikTok dapat menjadi sarana intervensi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta minat masyarakat terhadap penggunaan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) di Indonesia. Oleh karena itu, alternatif kebijakan ini dinilai memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan pendekatan lainnya.

### Logic Model Kebijakan Terpilih : Pemanfaatan Media Sosial

Munculnya media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, dan lainnya adalah salah satu contoh perkembangan media komunikasi yang sangat pesat seiring berkembangnya internet dan teknologi. Jumlah orang yang menggunakan

internet dan media sosial di Indonesia sangat besar, mencapai sekitar 15% penetrasi internet, atau lebih dari 38 juta orang. Banyak pengguna media sosial di Indonesia tentunya mendorong banyak pihak untuk mengoptimalkan media sosial sebagai alat untuk berbagi informasi dan mengajar masyarakat. Media sosial juga berfungsi sebagai sumber informasi dan berguna untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Pemerintah menggunakan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kelompok sasaran atau kelompok masyarakat tertentu.

## **Rekomendasi Kebijakan Kerangka Regulasi**

Dalam rangka mendukung pencapaian target kesertaan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP), pemanfaatan media sosial TikTok sebagai sarana komunikasi dan edukasi menjadi salah satu strategi yang efektif dan relevan dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Platform ini memungkinkan penyampaian informasi secara cepat, luas, dan menarik, sehingga berpotensi meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya pasangan usia subur.

Namun demikian, agar pemanfaatan platform ini dapat berjalan secara optimal serta tetap sesuai dengan norma, etika, dan ketentuan yang berlaku, diperlukan suatu kerangka regulasi yang jelas dan terstruktur. Kerangka regulasi tersebut perlu mengatur berbagai aspek, antara lain standar konten edukasi, kredibilitas sumber informasi, perlindungan data dan privasi pengguna, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Selain itu, regulasi juga perlu mendorong kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kreator konten dalam menghasilkan materi edukasi yang akurat, menarik, dan mudah dipahami. Dengan adanya kerangka regulasi yang komprehensif, pemanfaatan TikTok diharapkan tidak hanya efektif dalam meningkatkan kesertaan KBPP, tetapi juga tetap terarah, aman, dan berkelanjutan.

Tujuan utama regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh konten edukasi dan kampanye yang disampaikan melalui media sosial TikTok bersifat akurat, terpercaya, dan mudah diakses oleh masyarakat luas, khususnya kelompok sasaran program Keluarga Berencana (KB). Dengan demikian, informasi yang disampaikan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.

Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk melindungi privasi pengguna yang berinteraksi dengan akun resmi, termasuk dalam penggunaan fitur komentar, pesan, dan siaran langsung (*live*). Perlindungan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data serta menjaga keamanan informasi pribadi masyarakat.

Regulasi juga diarahkan untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, hoaks, atau konten negatif yang dapat merugikan masyarakat maupun menimbulkan stigma terhadap penggunaan KB, khususnya KBPP. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan, verifikasi konten, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan dan pihak terkait agar setiap informasi yang disampaikan tetap sesuai dengan standar ilmiah dan etika komunikasi publik.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, pemanfaatan TikTok diharapkan dapat menjadi media edukasi yang efektif, aman, dan bertanggung jawab dalam mendukung peningkatan kesertaan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) di Indonesia.

Konten yang disampaikan melalui media sosial harus berbasis bukti ilmiah (*evidence-based*) serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan organisasi kesehatan terkait. Hal ini penting untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan akurat, terpercaya, dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Dalam penyampaian informasi, bahasa yang digunakan harus sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, serta disesuaikan dengan karakteristik audiens. Selain itu, penggunaan bahasa yang komunikatif dan ramah juga perlu diperhatikan agar dapat menjangkau berbagai kelompok usia, termasuk remaja, tanpa mengurangi esensi dan ketepatan informasi yang disampaikan.

### **Implementasi Regulasi Daerah dan Provinsi**

Implementasi regulasi pemanfaatan TikTok sebagai instrumen dalam pencapaian target peningkatan kesertaan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) di tingkat daerah dan provinsi memerlukan adanya adaptasi kebijakan nasional ke dalam konteks lokal yang spesifik. Hal ini penting mengingat adanya perbedaan karakteristik sosial, budaya, tingkat literasi digital, serta akses terhadap teknologi di setiap wilayah.

Pemerintah daerah dan provinsi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran. Peran tersebut meliputi penyusunan kebijakan turunan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan strategi komunikasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, kader, serta kreator konten lokal, untuk menghasilkan materi edukasi yang relevan, kontekstual, dan mudah diterima oleh masyarakat. Pendekatan berbasis kearifan lokal juga dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan serta memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program KBPP.

Dengan demikian, implementasi regulasi yang adaptif dan kontekstual di tingkat daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan TikTok sebagai media edukasi, serta berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesertaan KBPP di Indonesia

### **Distribusi Tanggung Jawab Institutional**

Implementasi pemanfaatan TikTok sebagai instrumen strategis dalam upaya peningkatan kesertaan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) membutuhkan pembagian tanggung jawab yang terstruktur serta koordinasi yang erat antar berbagai institusi terkait. Setiap lembaga memiliki peran dan fungsi spesifik yang saling melengkapi guna memastikan program berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN memegang peran sentral sebagai pembuat kebijakan dan pengarah utama dalam penyelenggaraan program keluarga berencana. Lembaga ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional, menyusun pedoman teknis, serta mengembangkan strategi kampanye digital berbasis TikTok yang relevan dengan karakteristik pengguna. Selain itu, BKKBN juga berperan dalam mengelola akun resmi TikTok sebagai sarana komunikasi publik, memastikan kualitas, akurasi, dan

konsistensi konten edukasi, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan provinsi agar pesan yang disampaikan dapat disesuaikan dengan konteks lokal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam mengatur aspek teknis serta regulasi terkait penyebaran informasi di platform media sosial, termasuk TikTok. Kementerian ini bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap konten yang beredar, memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika komunikasi digital.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berperan dalam menjalin kerja sama dengan pihak TikTok, khususnya dalam hal moderasi konten, penanganan informasi yang menyesatkan, serta penanggulangan hoaks yang berpotensi merugikan masyarakat. Upaya ini mencakup pemantauan konten secara berkala, penerapan mekanisme pelaporan (*reporting system*), serta penghapusan konten yang melanggar ketentuan.

Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berperan dalam mengimplementasikan kebijakan dengan menyesuaikan strategi komunikasi digital sesuai kondisi wilayah. Dinas kesehatan dan instansi terkait bertanggung jawab dalam produksi konten lokal yang kontekstual, pelaksanaan kampanye berbasis video pendek, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader dalam memanfaatkan TikTok sebagai media edukasi.

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta kader di lapangan berperan sebagai ujung tombak dalam menyampaikan pesan secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mengarahkan sasaran program untuk mengakses dan memanfaatkan konten edukasi yang tersedia di TikTok. Kolaborasi dengan kreator konten dan influencer lokal juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan jangkauan, daya tarik, serta efektivitas penyampaian pesan kepada masyarakat. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dan koordinasi yang efektif antar institusi, pemanfaatan TikTok diharapkan dapat berjalan secara optimal dalam mendukung peningkatan kesertaan KBPP di Indonesia.

### **Mekanisme Evaluasi dan Monitoring**

Pemanfaatan TikTok sebagai media komunikasi dan edukasi dalam upaya peningkatan kesertaan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) memerlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis serta berkelanjutan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konten yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga efektif dalam meningkatkan pemahaman, membentuk sikap, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Selain itu, monitoring dan evaluasi juga berfungsi untuk menilai sejauh mana pemanfaatan TikTok mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keluarga berencana, khususnya bagi kelompok yang sebelumnya belum terjangkau. Proses ini mencakup pengukuran kinerja konten, analisis tingkat keterlibatan (*engagement*), serta evaluasi dampak terhadap peningkatan kesertaan KBPP.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan indikator yang jelas, seperti jumlah jangkauan audiens, tingkat interaksi pengguna, peningkatan pengetahuan masyarakat, serta perubahan perilaku dalam penggunaan kontrasepsi. Evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala guna mengidentifikasi kendala, memperbaiki strategi komunikasi, dan memastikan keberlanjutan program.

Dengan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur, pemanfaatan TikTok dapat dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan yang efektif, adaptif, dan berbasis data dalam meningkatkan kesertaan KBPP di Indonesia.

### **Roadmap Implementasi Strategis**

Roadmap implementasi strategis disusun sebagai panduan bertahap dalam mengoptimalkan pemanfaatan TikTok sebagai media komunikasi, edukasi, dan intervensi kebijakan dalam meningkatkan kesertaan KBPP di Indonesia. Roadmap ini mencakup beberapa tahapan utama sebagai berikut:

#### **1. Tahap Persiapan (0–6 bulan)**

Pada tahap ini dilakukan:

- Penyusunan regulasi dan pedoman teknis pemanfaatan TikTok
  - Penetapan standar konten edukasi berbasis bukti ilmiah
  - Pembentukan tim pengelola media sosial di tingkat pusat dan daerah
  - Pelatihan tenaga kesehatan dan kader terkait literasi digital dan produksi konten
- Tujuan tahap ini adalah memastikan kesiapan sistem, SDM, dan regulasi sebelum implementasi.

#### **2. Tahap Pengembangan (6–12 bulan)**

Tahap ini berfokus pada:

- Pembuatan dan pengujian berbagai jenis konten edukasi (video pendek, animasi, testimoni)
- Peluncuran akun resmi TikTok di tingkat nasional dan daerah
- Uji coba kampanye digital pada wilayah pilot project
- Kolaborasi dengan kreator konten dan influencer

Tahap ini bertujuan untuk mengembangkan model komunikasi yang efektif dan menarik.

#### **3. Tahap Implementasi (1–2 tahun)**

Pada tahap ini dilakukan:

- Pelaksanaan kampanye secara masif dan berkelanjutan
- Integrasi konten TikTok dengan layanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit)
- Penguatan peran tenaga kesehatan dan kader dalam mendukung edukasi digital
- Peningkatan jangkauan dan interaksi dengan masyarakat

Fokus utama tahap ini adalah memperluas dampak program secara nasional.

#### **4. Tahap Monitoring dan Evaluasi (berjalan terus-menerus)**

Meliputi:

- Analisis performa konten (views, engagement, share)
- Survei perubahan pengetahuan dan perilaku masyarakat
- Evaluasi peningkatan kesertaan KBPP
- Perbaikan strategi berdasarkan data dan umpan balik

Tahap ini memastikan program tetap adaptif dan efektif.

#### **5. Tahap Penguatan dan Keberlanjutan (2 tahun ke atas)**

Tahap akhir mencakup:

- Penguatan kebijakan berbasis hasil evaluasi
- Pengembangan inovasi konten dan teknologi baru
- Replikasi program ke seluruh wilayah Indonesia
- Integrasi dengan program kesehatan digital lainnya

Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang.

Dengan kesimpulan Roadmap implementasi strategis yang terstruktur dan bertahap memungkinkan pemanfaatan TikTok dilakukan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam kesertaan KBPP di Indonesia.

### 3. Kesimpulan

Kesertaan KB Pascapersalinan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari belum optimalnya sistem layanan kesehatan, terutama dalam aspek kemudahan akses, kompetensi tenaga kesehatan, serta kualitas konseling yang belum komprehensif dan berkelanjutan. Keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya pemahaman dan kepercayaan ibu terhadap metode kontrasepsi, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan dalam menggunakan KB Pascapersalinan.

Di sisi lain, pemanfaatan media sosial, khususnya TikTok, belum dimaksimalkan sebagai sarana edukasi kesehatan yang efektif. Padahal, TikTok memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi secara singkat, menarik, dan mudah dipahami, serta mampu menjangkau kelompok sasaran secara luas, termasuk ibu usia reproduksi. Melalui konten edukatif, testimoni, dan komunikasi interaktif, TikTok berpotensi memperkuat penyebaran informasi yang akurat serta mendukung proses konseling secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi melalui penguatan sistem layanan kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta optimalisasi pemanfaatan TikTok sebagai media edukasi dan promosi kesehatan, guna mendorong peningkatan kesertaan KB Pascapersalinan secara efektif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

### 4. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Profil Statistik Kesehatan Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Direktorat Bina Kesertaan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN (2024) Buku saku Promosi dan KIE KB Pascapersalinan Melalui Platform Media Sosial. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Laporan Akuntabilitas Intansi Pemerintah Direktorat Binas Kesehatan Reproduksi (2025) : Jakarta